

ANALISIS PROSEDUR PENCAIRAN DAN PENCATATAN KREDIT BAGI DOSEN DAN STAF UNIVERSITAS PAMULANG PADA BPR SEHAT SEJAHTERA

Dewi A'zzizah^a, Lukman Anthoni^b

^aFakultas Ekonomi dan Bisnis, dazzizah6@gmail.com, Universitas Pamulang

^bFakultas Ekonomi dan Bisnis, lukman.anthoni@gmail.com, Universitas Pamulang

ABSTRACT

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) function as institutions that gather and channel funds to the public. They play a strategic role in supporting the implementation of national development that has an impact on improving the standard of living for the community. The objective of this research is to understand the credit disbursement procedures for lecturers and staff at Pamulang University in BPR Sehat Sejahtera and the accounting recording of credit disbursement for lecturers and staff at Pamulang University in BPR Sehat Sejahtera. This research uses a qualitative descriptive method aimed at understanding the procedures and policies for credit disbursement at BPR Sehat Sejahtera branch and the accounting recording of credit disbursement at BPR Sehat Sejahtera. Based on the research conducted at BPR Sehat Sejahtera, it is found that the credit disbursement procedures for lecturers and staff are quite good, involving several stages such as credit application, initial verification, feasibility analysis, credit committee, cash section, and credit administration. The accounting recording of credit disbursement is also generally good, but there are some aspects that need improvement, such as the calculation of interest and administrative fees.

Keyword: Rural Banks, Credit Disbursement, Accounting Records.

ABSTRAK

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai lembaga yang berfungsi menghimpun dan menyalurkannya kepada masyarakat. Mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional yang berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prosedur pencairan kredit bagi dosen dan staf Universitas Pamulang di BPR Sehat Sejahtera dan pencatatan akuntansi pencairan kredit bagi dosen dan staf Universitas Pamulang di BPR Sehat Sejahtera. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur kebijakan pencairan kredit pada BPR Sehat Sejahtera cabang serta pencatatan akuntansi pencairan kredit pada BPR Sehat Sejahtera. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada BPR Sehat Sejahtera di ketahui bahwa prosedur pencairan kredit bagi dosen dan staf sudah cukup baik dengan beberapa tahapan permohonan kredit, verifikasi awal, analisa kelayakan, komite kredit, bagian kas dan admin kredit. Untuk pencatatan akuntansi pencairan kredit juga sudah cukup baik namun ada beberapa yang belum sesuai seperti perhitungan bunga dan biaya administrasi.

Kata Kunci: Bank Perkreditan Rakyat, Pencairan Kredit, Pencatatan Akuntansi.

1. PENDAHULUAN

Bank sebagai lembaga yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional yang berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Saat ini kondisi perekonomian Indonesia belum membaik. Hal ini menjadikan "Kredit" tidak asing bagi masyarakat. Bank dapat membantu memulikan perekonomian Indonesia yang memburuk akibat krisis global dengan cara memberikan kredit bagi pengusaha dan pegawai. Kredit selain memiliki fungsi dalam membantu masyarakat juga merupakan jantung dan urat nadi sebuah bank, tulang punggung bagi kehidupan usaha bank sebab pendapatan terbesar dari sebuah bank di peroleh dari jasa kredit itu sendiri. Sehingga setiap bank selalu berusaha meningkatkan mutu fasilitas kreditnya.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang melayani kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR sehat sejahtera menawarkan layanan simpan deposito berjangka atau tabungan, kredit dan pinjaman, pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah. BPR sehat sejahtera telah mengembangkan aplikasi untuk integritas kredit dan pinjaman terkhusus kepada Dosen dan Staf Universitas Pamulang, sehingga Dosen dan Staf

Universitas Pamulang dapat melakukan kredit dan pinjamannya di BPR Sehat Sejahtera. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terkhusus di Universitas Pamulang selalu berusaha untuk meningkatkan mutu layanan dan berharap masalah ekonomi masyarakat yang dihadapi sekarang ini dapat terbantu dengan adanya kredit dan pinjaman yang ditawarkan.

Setiap penyaluran kredit harus melalui mekanisme tahapan kredit yaitu, aplikasi permohonan kredit, analisa kredit, keputusan kredit, administrasi kredit, monitoring kredit, pengelola kredit bermasalah/no performing loan. Analisis permohonan kredit merupakan tahap pertama dari proses kredit dengan adanya permohonan kredit dari calon debitur, baik calon debitur dari hasil pemasaran petugas marketing (Solisit), atau debitur yang datang sendiri ke bank (walk-in customer). Analisa kredit merupakan tahap kedua atas permohonan kredit tersebut kemudian dilakukan survey atau peninjauan on the spot ke lokasi usaha, lokasi jaminan dan tempat tinggal calon debitur serta wawancara dengan meminta kelengkapan data sebagai bahan Analisa kredit lebih lanjut.

Keputusan kredit berdasarkan Analisa kredit, komite kredit melakukan penilaian untuk memutuskan apakah usulan kredit tersebut dapat disetujui atau ditolak. Administrasi kredit, hasil keputusan rapat komite kredit tersebut di teruskan ke unit administrasi kredit untuk diberitahukan kepada calon debitur melalui media yang memadai untuk menyampaikan kepada calon debitur permohonan kredit tersebut disetujui atau ditolak. Monitoring kredit tahap kredit yang disalurkan/dicairkan kepada debitur harus selalu di monitor, dan seminggu sebelum tanggal jatuh tempo angsuran kredit setiap bulannya, staf administrasi kredit dan staf pemasaran harus mengingatkan kepada calon debitur untuk menyiapkan uang/dana untuk membayar angsuran kreditnya yang akan segera jatuh tempo. Pengelolaan kredit bermasalah/non performing loan tahap aktiva produktif yang paling beresiko, sebagai konsekuensi dari penyaluran/pemberian kredit kepada debitur tentunya akan terjadi hal-hal yang sulit dihindari yaitu adanya kredit yang bermasalah (Non Performing Loan).

Penggolongan kredit berdasarkan cara penyaluran kredit. Pertama kredit perorangan merupakan kredit BPR Sehat Sejahtera yang di berikan kepada debitur perorangan sesuai dengan syarat-syarat pemberian kredit perorangan yang ada di BPR. Kedua kredit kolektif merupakan kredit yang diberikan oleh BPR Sehat Sejahtera dalam bentuk kolektif untuk Karyawan tetap, guru tetap maupun dosen tetap dan staf dalam bentuk potongan gaji oleh bendahara/bagian keuangan instansi yang bersangkutan disertai dengan perjanjian kerja sama/PKS antara BPR dengan Lembaga yang bersangkutan dengan secara teknis diatur dalam surat keputusan kredit multiguna kolektif BPR. Sistem pemberian kredit yang baik sangat diperlukan bagi perusahaan yang memberikan layanan kredit, begitu juga Bank BPR. Bank BPR sebagai bank yang besar dan memiliki perkembangan yang pesat diharapkan memiliki sistem pemberian kredit yang baik untuk meminimalisir risiko kredit tersebut.

Pemahaman mengenai pencatatan akuntansi dan laporan keuangan diperlukan oleh entitas maupun lembaga yang menyalurkan kredit produktif. Bagi entitas, sistem akuntansi berguna untuk memproses transaksi keuangan dan menyajikan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Sedangkan kegunaan pencatatan akuntansi dan laporan keuangan bagi lembaga yang menyalurkan kredit produktif yakni untuk menilai posisi keuangan, kinerja serta perputaran arus kas calon nasabah dalam proses penyaluran kredit. Dengan demikian harapannya kredit yang disalurkan dapat digunakan sesuai dengan tujuan sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan calon nasabah.

Dosen dan Staf Universitas Pamulang bisa mengajukan kredit pinjaman yang penggolongan kreditnya kredit kolektif syarat yang diberikan tergolong mudah, akan tetapi tidak semua orang mengerti bagaimana prosedurnya. Dalam pemberian kredit, kredit bank adalah kepercayaan dari bank sebagai debitur terhadap nasabah sepeminjam sebagai debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena di penuhi segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitur antara lain tujuan peruntukan kredit adanya benda jaminan atau agunan dan lain lain. Makna kepercayaan tersebut adalah keyakinan dari bank sebagai kreditur bahwa kredit yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima Kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Permohonan dan pemberian kredit juga mengandung unsur lain selain kepercayaan yaitu: unsur waktu, unsur resiko, dan unsur prestasi.

Pemberian kredit di tentukan juga mengenai unsur waktu, unsur waktu merupakan jangka waktu atau tenggang waktu tertentu antara pemberian atau pencairan kredit oleh bank dengan pelunasan kredit oleh debitur. Lazimnya pelunasan tersebut dilakukan oleh angsuran dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kemampuan debitur. Dengan terpenuhinya salah satu syarat dari pengajuan permohonan kredit yaitu adanya jaminan, maka seseorang bisa melakukan kredit. Selain istilah jaminan dikenal juga dengan agunan. Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank. Jaminan ini diserahkan oleh debitur kepada bank. Unsur-unsur agunan yaitu adanya jaminan tambahan diserahkan oleh debitur kepada bank dan ntuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan.

Pemberian kredit dengan jaminan SK Pengangkatan dosen merupakan suatu jenis kredit yang mana jaminan pokoknya adalah SK Pengangkatan dosen, sedangkan jaminan tambahannya bisa berupa surat tanah atau yang lainnya. Bank BPR Sehat Sejahtera salah satu bank yang berkantor di Universitas Pamulang Viktor Tangerang Selatan dimana bank ini banyak memberikan pelayanan kredit terutama bagi para dosen dan staf Yayasan sasmita jaya. Dosen dan staf Universitas Pamulang pun disini banyak menggunakan SK pengangkatannya sebagai jaminan untuk melakukan kredit di bank. Rumusan masalah ditentukan yakni bagaimana prosedur dan pencatatan akuntansi pencairan kredit bagi dosen dan staf Universitas Pamulang di BPR Sehat Sejahtera. Selain itu tujuan penelitian ditetapkan yakni untuk mengetahui prosedur dan pencatatan akuntansi pencairan kredit bagi dosen dan staf Universitas Pamulang di BPR Sehat Sejahtera.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Hukum Bank Perkreditan Rakyat

Landasan Hukum BPR adalah (UU No. 7 Perbankan, 1998) tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lintas pembayaran (“Tentang Perbankan Undang-Undang RI No.10 Tahun,” n.d.). Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan bank yang menghimpun dana dari masyarakat hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, serta menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat berupa pinjaman kredit. Usaha BPR meliputi usaha untuk menghimpun dan menyalurkan kembali dana tersebut dengan harapan memperoleh keuntungan, keuntungan BPR didapat dari *spread effect* dan pendapatan bunga. Usaha usaha yang dapat dilakukan BPR antara lain, menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dana atau bentuk lain nya yang disamakan dengan itu, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan kepada nasabah dengan prinsip bagi hasil, menyimpan dana nya pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Untuk penurunan nilai ditentukan dengan memperhatikan antara lain pengalaman, prospek industri, prospek usaha, kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas, kemampuan membayar debitur dan agunan yang dikuasai.

2.2 Fungsi Bank Perkreditan Rakyat.

Fungsi bank perkreditan rakyat tidak hanya menyalurkan kredit kepada para pengusaha mikro, kecil dan menengah, tetapi juga menerima simpanan dari masyarakat atau dengan kata lain berfungsi sebagai penghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat (Budisantoso Totok dan Nuritomo, 2019:197). Fungsi BPR secara lebih detail dapat diuraikan (Budisantoso, 2015) diantaranya:

1. Memberi pelayanan perbankan kepada masyarakat yang sulit atau tidak memiliki akses ke bank umum.
2. Membantu pemerintah mendidik masyarakat dalam memahami pola nasional agar akselerasi pembangunan di setor pedesaan dapat lebih dipercepat.
3. Menciptakan pemerataan kesempatan usaha terutama masyarakat pedesaan.
4. Medidik dan mempercepat pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan lembaga keuangan formal sehingga dari jeratan rentenir.

2.3 Manfaat Bank Perkreditan Rakyat.

BPR merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan peransuransian. Menurut Otoritas Jasa Keuangan manfaat BPR sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

2.4 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit maksudnya adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum suatu kredit diputuskan untuk diluncurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit. Prosedur pemberian kredit digunakan untuk mengelolah data yang berhubungan dengan usaha-usaha suatu perusahaan, yang menyebabkan terjadinya peristiwa pemberian kredit yang meliputi fungsi bagian yang terlibat dan dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pemberian kredit. Prosedur pemberian kredit dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap permohonan kredit.
2. Tahap penyelidikan berkas pinjaman kredit.
3. Tahap wawancara I.
4. Tahap *on the spot*.
5. Tahap wawancara II.
6. Tahap keputusan kredit.
7. Tahap penandatanganan kredit.
8. Tahap realisasi atau pencairan kredit.
9. Tahap penyelesaian atau pembayaran kembali kredit.

Menurut Piay, Y X E. Elim, L., & Lambey, R (Piay et al., 2018) dalam melaksanakan pemberian kredit, calon nasabah harus melalui beberapa tahapan proses untuk mendapatkan kredit yang diinginkan.

1. Permohonan kredit
2. Analisa kredit.
3. Persetujuan dan penolakan kredit.
4. Perjanjian kredit.
5. Pencairan kredit.

Prosedur pemberian kredit pada tahap awal yang harus ditangani oleh pihak bank (Suyatno, 2014)

1. Tahap permohonan kredit: Permohonan baru untuk mendapatkan suatu fasilitas kredit, permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan, permohonan perpanjangan atau pembaharu masa laku kredit yang telah berakhir jangka waktunya, permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas kredit yang sedang berjalan.
2. Berkas permohonan kredit: Surat-surat permohonan nasabah yang ditandatangani secara lengkap dan sah, daftar isian yang disediakan oleh bank dan diisi secara lengkap oleh nasabah, daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit.
3. Pencatatan, setiap surat permohonan kredit yang diterima harus dicatat dalam register khusus yang disediakan.
4. Kelengkapan dan berkas permohonan, permohonan dinyatakan lengkap bila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
5. Formulir daftar isian permohonan kredit, bank menggunakan daftar isian permohonan kredit yang harus diisi oleh nasabah, formulir neraca, daftar rugi/laba.

Menurut penelitian Play, Y. S. E., Elim, L., & Lambey, R (Piay et al., 2018) mengemukakan bahwa dalam sistem akuntansi pemberian pinjaman ada beberapa fungsi yang terkait di dalamnya, yaitu:

1. Fungsi *Secretariat*
Dalam fungsi sekretariat terdapat tanggung jawab pada penerima permohonan kredit dan surat pemberitahuan Fungsi penagihan. Dalam fungsi penagihan terdapat penanggung jawab pada penagihan piutang kepada debitur didasarkan sesuai dengan daftar piutang yang ditagih.
2. Fungsi Kas.
Dalam fungsi kas terdapat tanggung jawab pada penerimaan serta pengeluaran uang dan mengisi cek, meminta otorisasi atas cek dan mengirimkan cek kepada debitur.
3. Fungsi Akuntansi
Dalam fungsi akuntansi terdapat tanggung jawab dalain pencatatan penerimaan dan mengeluarkan kas serta laporan keuangan
4. Fungsi Pemeriksaan Intern
Dalam fungsi pemeriksaan *intern* terdapat tanggung jawab mencocokkan hasil perhitungan dengan saldo kus menurut catatan akuntansi (rekening kas dalam buku besar) dan melakukan perhitungan cash (*cash count*) secara periodik yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi. Selain tugas diatas fungsi pemeriksaan internal mempunyai tanggung jawab melakukan pemeriksaan mendadak (*surprised andu*) terhadap saldo kas yang ada ditangan dan membuat rekonsiliasi bank secara periodik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi-fungsi yan terlibat dalam pemberian kredit berhubungan satu sama lainnya dan tidak bisa dilewati, setiap fungsi berperan penting dalam menentukan pemberian kredit dan pengembalian dana kredit. Dengan melalui fungsi tersebut manajer perusahaan dapat menilai kinerja dari setiap fungsi agar tidak terjadinya perangkapan tugas dan tanggung jawab di setiap fungsinya.

2.5 Administrasi proses pemberian kredit.

Dalam penelitian (Piay et al., 2018) mengatakan bahwa dokumen merupakan secarik kertas yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi yang pertama kalinya sebagai dasar pencatatan dalam catatan dokumen yang digunakan dalam sistem pemberian kredit:

1. Formulir permohonan kredit. Formulir ini berisi data mengenai calon debitur yang akan mengajukan kredit. Formulir permohonan kredit (FPK) diisi oleh calon debitur yang ingin mengajukan kredit dan akan di cek ulang oleh bagian pemasaran. Dokumen ini akan di otorisasi oleh direktur dan bagian kredit, kemudian dimintakan tanda tangan permohonan yang bersangkutan.
2. Kuitansi. Kwitansi dibuat rangkap tiga oleh bendahara simpan pinjam sebagai telah mengeluarkan uang.
3. Bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas ini dilakukan oleh seksi akuntansi untuk menentat akuntansi pengeluaran kas berdasarkan slip atau bukti transaksi.
4. Bukti penerimaan kas. Bukti penerimaan kas sebagai bukti penerimaan kas dari debitur ketika membayar angsuran.
5. Kartu pinjaman. Kartu ini dibuat oleh bagian kredit yang digunakan untuk mencatat atas pembayaran angsurans kredit dari debitur.

Dokumen yang digunakan dalam pemberian kredit ini merupakan bukti rekaman jejak yang kuat bagi nasabah pembayaran kredit hingga pelunasan kredit Dan menjadi dasar yang kuat bagi pihak nasabah dan bank jika terjadi komplain kredit yang bisa di pertanggung jawabkan oleh kedua pihak.

2.6 Nasabah BPR/Perbankan

Nasabah adalah pelanggan atau (*customer*) yaitu individu atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa (Komaruddin, 2016). Nasabah menurut pasal 1 ayat (17) UU No. 10 tahun 1998 adalah “pihak yang menggunakan jasa bank “ Nasabah mempunyai peran penting dalam industri perbankan, dimana dana yang disimpan nasabah di bank merupakan dana yang penting dalam operasional bank untuk menjalankan usahanya. Adapun pengertian menurut para ahli sebagai berikut.

Istilah kalimat untuk pelanggan lebih sering diberikan kepada jasa non keuangan, seperti manufaktur, supermarket, hotel, dan lainnya. Sementara itu, istilah nasabah sering digunakan untuk perusahaan keuangan seperti bank, asuransi, leasing atau pegadaian. Namun, dalam pelayanan tetap sama karena kedua istilah tersebut mengandung arti yang sama, perbedaan yang melekat hanyalah terletak dalam hal sebagian kecil pelayanan saja (Kasmir, 2013)

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, nasabah adalah perseorangan atau badan yang menggunakan ataupun menerima fasilitas bank, baik dalam bentuk produk maupun jasa. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan (Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), 2013) Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa nasabah adalah seseorang atau bahan usaha yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman dan melakukan tranbsaksi simpanan dan pinjaman tersebut di sebuah bank.

Berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang perbankan yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah bank dibagi menjadi:

1. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dengan nasabah yang bersangkutan.
2. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Syarat menjadi nasabah sebelum membuka sebuah rekening baru pada Lembaga Keuangan, wajib menyiapkan beberapa hal yang penting untuk mendukung kelancaran proses pengajuan yaitu identitas diri (KTP), menyiapkan dana sebagai setoran awal dan menyediakan materai Rp. 10.000,-.

2.7 Kepuasan Nasabah

Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (hasil) yang ia rasakan di bandingkan dengan harapannya. Umumnya harapan pelanggan merupakan perkiraan atau keyakinan pelanggan tentang apa yang akan di terimanya bila iamembeli suatu produk (barang atau jasa) (Fandi Tjiptono, 2013). Pengukuran kepuasan pelanggan dapat dilakukan melalui 4 sarana yaitu (kotler, 2013):

1. Sistem keluhan dan saran artinya seberapa banyak keluhan atau komplain yang dilakukan nasabah dalam suatu periode. Makin banyak, berarti makin kurang baik demikian plus sebaliknya. Untuk itu perlu adanya sistem keluhan atau usulan.
2. Survei kepuasan nasabah. Dalam hal ini bank perlu secara berlaku melakukan survei, baik melalui wawancara maupun kuisisioner tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan bank tempat nasabah transaksi selama ini.

3. Konsumen sasaran. Bank dapat mengirim karyawan atau melalui orang lain untuk berpura-pura menjadi nasabah guna melihat pelayanan yang diberikan oleh karyawan bank secara langsung sehingga terlihat jelas bagaimana karyawan melayani nasabah sesungguhnya.
4. Analisis mantan pelanggan. Dengan melihat catatan nasabah yang pernah menjadi nasabah bank guna mengetahui sebab mereka tidak lagi menjadi nasabah bank kita.

2.8 Perhitungan Akuntansi Pencairan Kredit

Akuntansi adalah kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran terhadap kegiatan ekonomi perusahaan yang dinyatakan dalam bentuk uang (Yeni Wati, 2019). Akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasikan dan mengikhtisarkan transaksi dan kejadian yang terjadi, paling tidak sebagian, bersifat keuangan dan dengan cara bermakna dan dalam satuan uang, serta menginterpretasikan hasil-hasilnya (Eldon, 2015). Fungsi *pengoutputan*: akuntansi menyajikan informasi dana sesuai kebutuhan penggunaan agar dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan.

Pendekatan pengukuran diantaranya:

1. *Plafond* Kredit. *Plafond* kredit wajib mengikuti ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sesuai Dengan Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat (POJK No. 49/POJK.03, 2017). *Plafond* kredit minimal: Rp. 5.000.000,- per debitur dan maksimal sesuai dengan ketentuan BMPK dengan tetap berdasarkan prinsip kehati-hatian.
2. Tarif
 - a. Suku bunga kredit dikisaran 4,00 % flat p.a., s.d 10,00 % flat p.a. baik untuk perorangan maupun untuk kredit kolektif.
 - b. Provisi dikisaran 0,5 % sd 1,50 %.
 - c. Administrasi dikisaran 0,25% sd 0,35%.
 - d. Legalisasi Rp. 100 ribu sd. Rp. 200 ribu per debitur.
 - e. Blokir 1 x angsuran sesuai jumlah cicilan per bulan.
 - f. Materai 4 lembar @ Rp. 10.000.
 - g. Biaya-biaya lainnya (jika ada).
3. Jangka Waktu Kredit Kolektif dan Kredit Perorangan. Jangka waktu kredit minimum 6 bulan dan maksimum 96 bulan (8 tahun).
4. Jangka Waktu kredit Pemilikan Rumah (KPR). Jangka waktu kredit maksimum 180 bulan (15 tahun).
5. Denda. Denda untuk keterlambatan pembayaran angsuran adalah sebesar 2,5% dari angsuran per bulan.
6. Asuransi Jiwa Kredit. *Plafond* diatas Rp. 50.000.000,- keatas yang dapat ditutup oleh asuransi jiwa dengan memperhatikan masa usia debitur pada saat kredit jatuh tempo kredit. Serta mengikuti ketentuan dan persyaratan dari pihak jasa asuransi yang ditunjuk dan bekerja sama dengan BPR.
7. *Debt Service Ratio*(DSR) pada saat pencairan dalam rentang 0% sd maksimum 70% yang dihitung dari penghasilan bersih untuk perorangan atau dari laba bersih (untuk wirausaha). Untuk pinjaman kolektif karyawan, guru ataupun dosen dan staf, DSR disesuaikan dengan hasil perhitungan kemampuan debitur yang bersangkutan berdasarkan informasi dari bendahara/bagian keuangan pemotong gaji lembaga yang bersangkutan
8. *Collateral Coverage Ratio* (CCR) minimum = 125 % untuk Sertifikat Tanah CCR minimum = 110 % untuk BPKB kendaraan baru CCR minimum = 110 % untuk deposito (*back to back*) a.n BPR Sehat Sejahtera CCR Minimum = 120 % untuk BPKB kendaraan bekas pakai (*second*). CCR emas batangan cap Logam Mulian (LM) minimum 118% Harga adalah harga pasar umum yang wajar untuk setiap jaminan.
9. *Loan To Value* (LTV) maksimum 80% dengan pengikatan jaminan paling sedikit secara dibawah tangan dan dengan surat kuasa jual yang ditandatangani secara lengkap.
10. Nilai Likuidasi Jaminan/Agunan
 - a. Tanah dan Bangunan: 80% x harga pasar wajar
 - b. Kendaraan: 70% x harga pasar wajar
 - c. Mesin-mesin: 60% x harga pasar wajar

Perhitungan Akuntansi Pencairan Kredit

- a. Angsuran Perbulan
 Pokok pinjaman per bulan = $Rp \text{ xx.xxxx} / \text{bulan} = Rp \text{ xxxxx}$
 Bunga = Total Pinjaman x 9,5% (bunga BPR)/ bulan= $Rp \text{ xxxxx}$
 cicilan per bulan Pokok Pinjaman + Bunga = $Rp \text{ xxxxx}$
- b. Pelunasan di percepat. Pelunasan kredit di percepat = sisa cicilan pokok + bunga berjalan + adm

3. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan teknik analisa kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan keterangan dalam bentuk uraian. Penelitian kualitatif berdasarkan pada deskripsi yang jelas dan detail, karena menjawab

pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana serta data yang diperoleh dari penelitian ini berupa kata – kata, gambar dan bukan angka. Berfikir induktif adalah suatu cara berfikir yang berawal dari fakta yang khusus dan konkrit kemudian dari peristiwa tersebut ditarik kesimpulan. Dalam penerapannya Teknik ini digunakan untuk menganalisis secara umum tentang prosedur pemberian kredit Yayasan sasmita jaya berdasarkan data diperoleh dari perusahaan dan kendala yang sering menghambat proses pemberian kredit.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* atau *enterpretif*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi, data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, dan memahami keunikan, mengkontruksi fenomena, dan menemukan hipotesis (Sugiyono, 2018)

Dalam kutipan STEI Indonesia pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah, pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. (Sugiyono, 2018:476).

Wawancara dapat dipakai sebagai cara pengumpul data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur yang menggunakan intrumen berupa formulir wawancara yang merupakan alat bantu untuk memberikan pertanyaan kepada staf mengenai prosedur pemberian kredit. Wawancara menjadi salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk memperoleh informasi dari informan yang terkait. Menurut Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung atau bertanya secara langsung mengenai suatu objek yang diteliti.

Wawancara yang dipilih oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin (Sugiyono, 2018:476). Wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat. Pertanyaan akan berkembang pada saat melakukan wawancara. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian (Arikunto (206:19). Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J. Moleong., 2013).

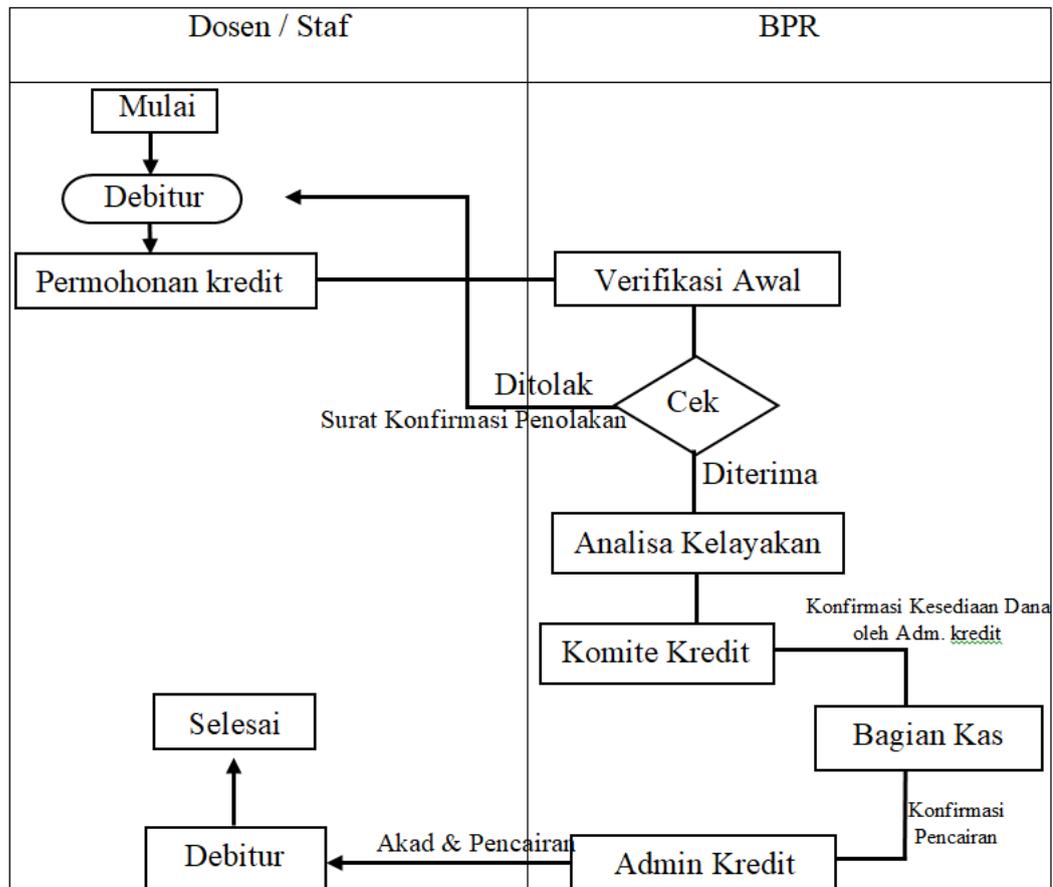
Dokumentasi dapat dipakai sebagai cara pengumpulan data dengan melihat secara langsung laporan, *arsip*, dokumen pendukung serta gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dapat yang dilihat dari perusahaan berupa *cklst* kelengkapan *form* permohonan kredit kolektif karyawan, *form* surat kuasa yang digunakan dalam prosedur pencairan kredit pada BPR Sehat Sejahtera. Dokumentasi. Menurut (Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan sertaketerangan yang dapat mendukung penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya atau mempunyai kredibilitas yang tinggi jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik yang sudah ada.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Prosedur Pencairan Kredit

BPR Sehat Sejahtera bekerja sama dengan Yayasan Sasmita grup dalam meningkatkan performa dalam rencana bisnis agar berjalan dengan baik. BPR Sehat Sejahtera berdiri pada tahun 90-an, saat perusahaan tidak berjalan dengan baik BPR Sehat Sejahtera di ambil alih oleh Ketua Yayasan Sasmita Jaya Alm Bapak Dr. Hc. H Darsono dan Dr. Dayat Hidayat, MM yang bertujuan untuk perusahaan menjadi lebih baik. BPR Sehat Sejahtera di resmikan pada hari selasa, 15 Desember 2020 oleh ketua Yayasan Sasmita Jaya yang beralamat di Gedung kampus Universitas Pamulang 3, Jl. Puspitek No. 11, Buaran, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310, Indonesia. Kegiatan yang ada di BPR Beberapa hal antaranya memberikan layanan registrasi untuk mahasiswa baru Universitas Pamulang. Pembagian gaji karyawan kebersihan gedung kampus, dan memberikan lowongan magang untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. VISI lembaga adalah menjadikan bank perkreditan rakyat yang kokoh dan terpercaya yang mendukung prekonomian nasional. MISI lembaga adalah menjadikan mitra kerja yang baik bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk kesejahteraan bersama. Sedangkan MOTO “Teman Usaha Yang Terpercaya”.

Prosedur pencairan kredit bagi dosen dan staf Universitas Pamulang Pada BPR Sehat Sejahtera. Prosedur pencairan kredit yang ada pada BPR Sehat Sejahtera dijelaskan sebagai berikut:



Sumber: SOP diolah peneliti

Gambar 1. Prosedur Pencairan Kredit

Adapun penjelasan dari gambar 1, sebagai berikut:

1. Debitur. Dimulai dari debitur mengajukan permohonan kredit yang harus diisi oleh pemohon yang memuat beberapa catatan (informasi) tentang pemohon antara lain jaminan yang digunakan untuk pengajuan sebuah kredit terkhusus dosen dan staf. Syarat yang harus dipenuhi apabila jaminan berupa sertifikat sebagai berikut :
 - a. Membawa sertifikat asli
 - b. Membawa fotocopy kartu identitas asli (KTP) + fotocopy Kartu Keluarga
 - c. Membawa fotocopy NPWP
 - d. Membawa fotocopy Surat Nikah
 - e. Membawa Surat Keterangan dosen tetap (Asli)
 - f. Surat Keterangan yang menyatakan Ring 1 atau Ring 2 dari Yayasan (Asli)
 - g. SK Yayasan
 - h. Surat Penghasilan dari Yayasan (Asli)
 - i. Slip gaji 3 bulan terakhir dari Yayasan (Asli)
2. Verifikasi Awal. Setelah debitur mengajukan permohonan kredit di terima pihak bank, pihak bank melakukan proses verifikasi pengecekan data debitur dan menentukan layak atau tidak untuk dilanjutkan ke proses Analisa Kelayakan.
3. Analisa Kelayakan. Analisa Kelayakan kredit ini pihak bank meminta pendapat kepada komite kredit dengan menggunakan kriteria 5C yaitu *Character* atau watak calon debitur, *Capacity* atau kemampuan calon debitur, *Capital* atau permodalan, *Callateral* atau jaminan yang di ajukan oleh calon debitur serta *Condition* atau kondisi dari calon debitur.
4. Komite Kredit. Berdasarkan Analisa kelayakan yang dilakukan admin kredit membuat rekomendasi kredit yang dituangkan pada komite kredit dan memberikan kepada tim komite. Tim komite memastikan bahwa

informasi dan data yang di berikan oleh calon debitur sesuai fakta. Memastikan tujuan penggunaan kredit tidak melanggar peraturan yang berlaku.

5. Bagian Kas. Setelah melakukan pengecekan oleh komite kredit, komite kredit memberikan dokumen dokumen calon debitur ke admin kredit untuk di tindak lanjutkan kan. Admin kredit mengkonfirmasi ketersediaan dana ke bagian kas untuk melakukan proses pencairan kredit
6. Admin Kredit. Setelah itu bagian kas memberi tau kepada admin kredit bahwa dana peminjaman sudah bisa diserahkan kepada calon debitur. Selanjutnya admin kredit menghubungi calon debitur untuk melakukan akad dan proses pencairan kreditnya. Pencatatan Akuntansi Pencairan Kredit bagi Dosen dan Staf Universitas Pamulang pada BPR Sehat Sejahtera.

Dari hasil penelitian, dapat di ketahui bahwa Pencatatan akuntansi pencairan kredit bagi dosen dan staf sudah berjalan dengan semestinya. Penentuan tarif pada BPR Sehat Sejahtera telah tertulis dalam kebijakan pengkreditan rakyat tahun 2020 sebagaimana semestinya sudah tertulis dalam kebijakan BPR untuk tarif Provisi dikenakan 1%, tarif Administrasi dikenakan 0,35%, tarif legalisasi Rp.100.000,-. Dan biaya lain lain (jika ada). Dan untuk *Plafond* diatas Rp. 50.000.000,- keatas yang dapat ditutup oleh asuransi jiwa dengan memperhatikan masa usia debitur pada saat kredit jatuh tempo kredit. Serta mengikuti ketentuan dan persyaratan dari pihak jasa asuransi yang ditunjuk dan bekerja sama dengan BPR.

4.2 Perhitungan Kredit dengan Suku Bunga *Flat*.

Ibu Rifa seorang dosen di Universitas Pamulang dan sudah menjadi dosen tetap di Universitas Pamulang dan masuk di ring dua. Ibu Rifa mengajukan permohonan kredit kepada BPR Sehat Sejahtera sebesar 50 Juta penghasilan Rp.5.000.000 . Di setuju pada tanggal 27 Oktober 2021, jangka waktu 12 bulan dengan tingkat suku bunga 9,5 % pa (suku bunga flat). bea materai 10.000 untuk 1 materai di nutuhkan 4 materai, biaya provisi 1%, biaya administrasi 0,35%, Legalisasi 100.000, dan biaya asuransi Rp.250.000 hitunglah berapa total pencairan yang di terima ibu rifa.

Tabel 1. Penurunan *Plafond* Atau Pencairan Kredit

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
	Fasilitas kredit yang diberikan	Rp.50.000.000	
	Kas		Rp.50.000.000

Sumber: data diolah peneliti

Tabel 2. Biaya-Biaya Yang Harus Di Bayar Nasabah

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
	Rekening Nasabah	Rp.50.000.000	
	Provisi Kredit		Rp.500.000
	Pendapatan Adm. Bank		Rp.175.000
	Biaya Lain-lain		Rp.374.000

Sumber: data diolah peneliti

Jadi total pencairan yang di terima ibu Rifa sebesar Rp.48.951.000, karna total pinjaman dikurang biaya yang harus dibayar.

Pembayaran angsuran per bulan.

Pokok pinjaman/bulan = $Rp.50.000.000/12 = Rp.4.166.666$

Bunga = $Rp.50.000.000 \times 9,5\%/12 = Rp.395.833$ Jadi, cicilan per bulan yang harus dibayar setiap bulan adalah sebesar: Rp 4.166.666 juta + Rp 395.833 ribu = Rp. 4.562.499 . (karna Bunga di BPR menggunakan suku bunga *flat* jadi setiap cicilan besaran perbulannya sama).

Perhitungan Suku bunga *Flat* dengan pelunasan dipercepat

Bapak Ridwan meminjam uang di BPR sebesar RP.40.000.000 dengan periode pinjaman 2th, suku Bunga 9,5% (suku bunga *flat*) yang telah diangsur selama 14 bulan, administrasi Rp.100.000 hitunglah jika pelunasan kredit di percepat.

Pelunasan Kredit di percepat = sisa cicilan pokok+bunga berjalan+adm

Tabel 3. Rincian Biaya

Pinjaman	Rp.40.000.000
Periode	24 bulan

Suku Bunga Flat	9,5%
Telah Diangsur	14 bulan
Biaya:	
Adm	Rp.100.000

Sumber: data diolah peneliti

Tabel 4. Perhitungan Pinjaman

Pinjaman	Periode	Cicilan
Rp.40.000.000	24 bulan	Rp.1.666.667/bulan
Rp.1.666.667	10 bulan	Rp.16.666.667
Rp.1.666.667	14 bulan	Rp.23.333.338

Sumber: data diolah peneliti

Tabel 5. Perhitungan Bunga

Suku Bunga	Pinjaman	Periode	Bunga
9,5%	Rp.40.000.000	12 bulan	Rp.316.667/bulan
	Rp.316.667	10 bulan	Rp.3.166.667

Sumber: data diolah peneliti

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh angsuran cicilan perbulan sebesar $Rp.1.666.667 + Rp.316.667 = Rp.1.983.334/bulan$. Untuk angsuran 14 bulan yang sudah dilunasi sebesar $Rp.23.333.338$ dan untuk cicilan angsuran 10 bulan yang akan dilunasi secara dipercepat sebesar $Rp.16.666.667 + Rp.3.166.667 + Rp.100.000$ (biaya admin) sebesar $Rp.19.933.337$.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Prosedur pencairan kredit bagi dosen dan staf universitas Pamulang di BPR Sehat Sejahtera

Dalam prosedur pencairan kredit BPR Sehat Sejahtera dilakukan melalui tahap-tahap dalam penyaluran kredit yang terdiri dari debitur mengajukan permohonan kredit, dan pihak BPR melakukan verifikasi awal untuk melakukan pengecekan jika ditolak permohonan kredit dikembalikan ke pihak debitur jika permohonan kredit diterima akan dilakukan analisa kelayakan, setelah dari analisa kelayakan akan diserahkan ke komite kredit yang dimana komite kredit mengajukan konfirmasi kesediaan dana pada bagian kas, dari bagian kas mengkonfirmasi kesediaan dana ke admin kredit, admin kredit menghubungi pihak debitur untuk melakukan proses akad dan pencairan kredit.

Dalam prosedur yang dilakukan oleh BPR yang dimana dalam hal ini sangat membantu proses penyaluran kredit bagi bank, khususnya bagian pemberian kredit dalam memutuskan layak atau tidak layak debitur dalam mengajukan pinjaman kredit. Menjadi pertimbangan bagi BPR dalam pelaksanaan pemberian kredit berdasarkan ketentuan perusahaan yang sudah ditentukan oleh bank tersebut. Dalam teori prosedur pencairan kredit menurut (Piay et al., 2018) terdapat Sembilan tahap diantaranya permohonan kredit, penyelidikan berkas pinjaman kredit, wawancara I, *on the spot*, wawancara II, keputusan kredit, penandatanganan kredit, realisasi atau pencairan kredit, penyelesaian atau pembayaran kembali kredit. Dalam hal ini penulis menganalisa prosedur pencairan kredit yang dilakukan BPR Sehat Sejahtera, belum sesuai dengan teori yang ada, BPR hanya menggunakan tahapan yang berbeda BPR menggunakan tahapan permohonan kredit, verifikasi awal, analisa kelayakan, komite kredit, bagian kas dan admin kredit secara keseluruhan prosedur dalam menjalankan tahap-tahap pemberian kredit belum sesuai teori yang ada.

4.3.2 Pencatatan Akuntansi pencairan kredit bagi dosen dan staf Universitas Pamulang di BPR Sehat Sejahtera.

Dalam pencatatan akuntansi pencairan kredit pada BPR Sehat Sejahtera yang dimana melalui tahap – tahap dalam pencatatan akuntansi pencairan kredit yang sudah sesuai dengan pedoman akuntansi perbankan bank perkreditan rakyat (BPR) yang dimana pencairan kredit akan dipotong dari biaya provisi, biaya admin, biaya asuransi. Hal ini sangat membantu *manager* untuk menganalisis bagaimana perkembangan perkreditan pada bank BPR Sehat Sejahtera apakah mengalami peningkatan atau penurunan. Secara keseluruhan dalam pencatatan akuntansi pencairan kredit di BPR sudah menggunakan *system* yang dimana BPR Sehat Sejahtera sudah didukung dari adanya unsur – unsur *system* informasi akuntansi antara lain : SDM, *Tools*, Metode. Sedangkan teori pencatatan akuntansi menurut Ramly dan Rustan BPR Sehat Sejahtera belum memenuhi kriteria pencatatan akuntansi pencairan kredit.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dan uraian yang di peroleh dan dijelaskan penulis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan penelitian yang di lakukan pada BPR Sehat Sejahtera di ketahui bahwa prosedur pencairan kredit bagi dosen dan staf sudah cukup baik dengan beberapa tahapan permohonan kredit, verifikasi awal, analisa kelayakan, komite kredit, bagian kas dan administrasi kredit. Penerapan pencatatan akuntansi terhadap proses pemberian kredit pada BPR Sehat Sejahtera dinilai sudah memadai. Hal ini didukung dari adanya unsur-unsur sistem informasi akuntansi antara lain SDM, *Tools*, Metode, yang sudah sesuai dengan aturan SOP perusahaan. Namun ada beberapa yang belum sesuai seperti pencatatan seperti perhitungan bunga dan biaya administrasi.

5.2 Saran

Saran untuk BPR Sehat Sejahtera harus melakukan evaluasi terhadap tahap tahap pencairan kredit agar sesuai dengan teori yang ada. BPR Sehat Sejahtera harus melakukan sosialisasi dalam proses pencatatan akuntansinya agar tidak terjadi kesalahan dalam menginput data nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Baridwan, Z. (2021). Prosedur. *Zaki Baridwan (2021:30)*, 2013–2015.
- [2] Bastian, Indra, dan S. (2015). *Akuntansi Perbankan*. Jakarta: Salemba Empat.
- [3] Budisantoso, T. dan N. (2015). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*.
- [4] Eldon (2000:135). (2015). Penerapan Jurnal Akuntansi Sederhana Dalam Menghasilkan Laba Usaha Pada Bisnis Pengharum Laundry. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 92–107.
- [5] Fandi Tjiptono. (2013). *Manajemen Jasa*, Yogyakarta.
- [6] Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP). (2013). *Memahami Bisnis Bank*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- [7] Kamsir. (2021). Fungsi utama perbankan. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 6(2), 1719–1738.
- [8] Kasmir. (2013). *Kewirausahaan Jakarta: Rajawali Pers*.
- [9] Komaruddin. (2016). *Kamus Perbankan Jakarta CV. Rajawal*.
- [10] Kotler. (2013). *Kutipan Fandy Tjiptono*.
- [11] Lailiyah, A. "Urgensi A. 5c P. P. K. P. U. M. R. . Y. 29. . (2014). (2014). *No Title*.
- [12] Lexy J. Moleong. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [13] Mulyadi 2016:4. (2016). *Pengertian Prosedur*. 9–25.
- [14] Piay, Y. S. E., Elim, I., & Lambey, R. (2018). Analisis Sistem Akuntansi Pemberian Kredit Agunan Rumah (Kar) Pada Pt. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02), 119–128. <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19107.2018>
- [15] POJK No. 49/POJK.03. (2017). *Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat*.
- [16] Ramly dan Rustan. (2017). *Catatan Akuntansi Kredit :141*.
- [17] Rifka R.N. (2017). *Economics Evolutionary. Prosedur*, 23(4), 1–10.
- [18] Simatupang, H. B. "Peranan perbankan dalam meningkatkan perekonomian indonesia. . J. (Jurnal R. A. M. 6. . (2019): 136-146. (2019). *No Title*. Simatupang, H. Bachtiar. "Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia." *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)* 6.2 (2019): 136-146.
- [19] Sugiyono (2018:102). (2013). Pengaruh Model Concep Sentence Terhadap Keterampilan Menulis Cerita Kelas V di SD Negeri Jeruklegi Wetan 03 Tahun Ajaran 2018/2019. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- [20] Sugiyono (2018:476). (2017). Bab iii metoda penelitian 3.1. *Bab III Metoda Penelitian, Bab iii me*, 1–9.
- [21] Sugiyono, P. D. (2018). *metode penelitian kualitatif*.
- [22] Suyatno. (2014). *Dasar-Dasar Perkreditan Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama*.
- [23] Tentang Perbankan Undang-Undang RI No.10 Tahun. (n.d.). 2014.
- [24] *UU No. 40 Tahun*. (2007).
- [25] *UU No. 7 Perbankan*. (1998).
- [26] Yeni Wati. (2019). *Perancangan dan Penyusunan Sistem Akuntansi*.